BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak yang melakukan tindak pidana ini sering disebut anak nakal. Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang peradilan bagi anak di negara tersebut.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai Pengertian kenakalan anak (*Juvenile delinquency*), yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency* (jahat, criminal, pelanggar aturan dan lain-lain). Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yakni “anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”². Sehingga harus

¹Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Cet.IV (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 67.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

mendapatkan sanksi yang sesuai atas apa yang dilakukannya. Sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mempertahankan hak-hak anak dan

melindungi hak-hak anak tersebut.³ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan “bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan social sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi”⁴.

Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan anak kelompok lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan dalam menjalani proses peradilan.⁵ Anak tersebut harus terpaksa menghadapi situasi dan keadaan yang amat rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun emosional yang menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Negara harus terpaksa mengadapi situasi dan keadaan rentan yang amat rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun emosional yang menghancurkan martabat dan masa depannya. negara harus menjamin terselenggaranya perlindungan anak-anak ketika berkonflik dengan hukum seperti bunyi konvensi yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi hak-hak anak tersebut menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak anak, yaitu:

1. Hak untuk hidup, setiap anak di dunia berhak untuk mendapat akses atas pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak,

³Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Pampas: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 2.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, Cet. 4, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77.

⁵Elly Sudarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2011, hlm. 2.

- termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, setiap anak berhak memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun formal secara memadai. Konkretnya anak di beri kesempatan untuk bermain, berekreasi dan beristirahat.
 3. Hak memperoleh perlindungan, artinya setiap anak berhak melindungi diri dari eksploitasi ekonomi dan sosial, kekerasan fisik atau mental, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan segala bentuk diskriminasi, ini juga berlaku bagi anak yang tidak lagi mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada di tempat pengungsian.
 4. Hak untuk berpartisipasi, artinya setiap anak di beri kesempatan menyuarakan pandangan, ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.⁶

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal ini tidak lagi dimuat dan digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur system peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus anak behadapan dengan hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

⁶Sulistiowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak, UNICEF Untuk Indonesia*, PT. Enka Parahiyangan, Jakarta, 2003, hlm. 85.

sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan system peradilan.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana ini dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar Lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Perhatian kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain kedua pidana diatas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga pidana berupa tindakan yang dimuat dalam Pasal 82 ayat (1), yaitu:

- Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPSK;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana di jatuhkan pidana penjara oleh hakim. Ketentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah

⁷Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi, *Op Cit.*, hlm. 2.

setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa atau batas minimumnya adalah 1 hari.

Bagi Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap narapidana anak, dilakukan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.”

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat narapidana anak yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B, seperti yang terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kelas II B kuala tungkal.

⁸<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020, Pukul. 14.36 WIB.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, “terdapat 3 narapidana anak yang dibina di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal, 2 kasus pencurian dan 1 kasus penganiayaan terhadap anak”⁹. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”, selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa”. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar apakah anak yang dibina di lembaga kelas II B tersebut mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- 2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- 3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga sangat menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak tersebut serta pemenuhan hak-hak narapidana anak tersebut, oleh karena itu penulis tertarik

⁹Wawancara dengan Iman Siswoyo Kepala LAPAS kelas II B Kuala Tungkal, pada Tanggal 5 Juni 2020

untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembinaan narapidana anak di LAPAS kelas II B kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pembinaan Narapidana Anak di LAPAS Kelas II B Kuala Tungkal?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan narapidana anak di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritik yang diharapkan pada penelitian ini yaitu dapat memberikan memberikan konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum, khususnya hukum pidana dalam pembinaan narapidana anak di LAPAS Kelas II B.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam pengetahuan pemenuhan hak-hak narapidana anak di LAPAS kelas II B.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka diberikan penjelasan yang perlu disimak pengertian sebagai berikut:

1. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ke taqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.”

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah:

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya.
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan.
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat”¹⁰.

2. Narapidana Anak

Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ialah:

¹⁰M.B. Ali, T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2000, hlm. 82.

¹¹Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum*, Cet. I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 447.

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Didalam hal ini, narapidana termasuk juga didalamnya anak pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan ialah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang di maksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian beberapa konsep di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian judul skripsi ini adalah “Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”

E. Landasan Teoretis

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pembinaannya, narapidana anak tersebut harus mendapatkan hak-haknya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g”. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tersebut diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹²

Selanjutnya, Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu :

¹²Maulana Hasan Wadong, *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*, Grasindo, hlm. 29.

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode:

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku;
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung;

3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.¹³

1. Teori Kewenangan Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani pidana penjara, sekaligus merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya¹⁴.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali di kemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan

¹³Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, hlm.12.

¹⁴Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.

rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.¹⁵

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan pendidikan, dan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dicantumkan bahwa program

¹⁵P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, Hukum Penintansir Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.166.

pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, jadi jelas bahwa narapidana wanita juga mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kepribadian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan dipertegas bahwa program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana pembinaan narapidana dituntut untuk lebih transparan, tidak diskriminasi dalam melakukan pembinaan terhadap sesama narapidana sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar.

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah

pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

2. Teori Pola Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan terkadang tidak menjamin berubahnya tingkah laku narapidana ke arah yang lebih baik hal ini memberi salah satu aspek penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana dikarenakan tidak diakui pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik malah sebaliknya.

Mengenai pembinaan yang dilakukan oleh petugas di lembaga pemasyarakatan

C.I. Hasono memberikan komentar:

“Pembinaan narapidana merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana, bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, masih ada yang hanya sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal bekerja saja tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang”.¹⁶

Keberhasilan atau kegagalan dalam pembinaan residivis sangat tergantung pada sistem peradilan pidana. Kegagalan salah satu komponen untuk mencegah mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya, tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga ditimpakan kepada komponen-komponen lainnya, maka dari itu komponen harus bekerjasama dalam perbaikan sikap pelaku tindak pidana. Tujuan sistem pemasyarakatan ialah integrasi hidup, kehidupan, dan penghidupan antara

¹⁶Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 126.

narapidana dan anak didik yang bersangkutan dengan masyarakat. Reintegrasi ini hendaknya diwujudkan melalui proses pembinaan narapidana atau residivis dan anak didik yang melibatkan tiga unsur yakni narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dalam arti luas seperti, keluarga, korban, instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan, dan lain-lain.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadaan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresifitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing anak akan dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.
- b. Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.

- c. Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah anak-anak binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.
- d. Melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak.

Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan kriminal atau tidak. Anak sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan agar mereka dapat survive menghadapi masyarakat luas. Selain itu masih diperlukan pendamping baik secara financial, maupun control terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut penulis uraikan komponen-komponen sebagai berikut:

¹⁷Umi Enggarsasi, *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Elly Sudarty, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume XVIII, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, 2013.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal.

2. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris yaitu “penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada”.¹⁸ Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan objek yang diteliti berkenaan dengan pembinaan narapidana anak di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel untuk narapidana anak dilakukan secara Accidental Sampling, yaitu sampel narapidana anak diambil yang kebetulan ada pada saat penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

1. Keysan Alfarabi Bin Darmantyo;
2. Wawan Bin Abun Yan;
3. Ahmad Fauzan Bin Jali .

Adapun responden pejabat penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, yang ditujukan kepada pejabat yang mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Kepala LAPAS Kelas II B Kuala Tungkal yaitu Iman Siswoyo, Bc.IP., S.H.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara:

a. Wawancara,

Untuk memudahkan penulis wawancara terhadap responden pejabat dilakukan dengan menggunakan Pedoman Wawancara, point-point yang akan ditanyakan penulis persiapan terlebih dahulu. Sedangkan untuk responden narapidana anak penulis melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari literature-literatur, dokumen-dokumen, buku-buku, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memperhatikan bahan-bahan dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik itu data primer, data sekunder maupun tertier disusun dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab II. Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

Bab III. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pembinaan terhadap narapidana anak di LAPAS kelas II B kuala Tungkal dan

kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LAPAS kelas II B Kuala Tungkal.

Bab IV. Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.